

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdul Mannan, *Membangun Islam Kaffah*, Madina Pustaka, Jakarta, 2000.
- Agung Djojosoekarto, *Dinamika Dan Kapasitas DPRD Dalam Tata Pemerintahan Demokratis*, Konrad Adeneur Stiftung, Jakarta, 2004.
- Ahmad Helmy Fuady, *Memahami Anggaran Publik*, Idea Press, Yogyakarta, 2002.
- Ahmad Ibrohim Abu Sinn, *Manajemen Syariah*, Raja Grafindo, Jakarta, 2006.
- Amrah Muslimin, *Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah*, Alumni, Bandung, 1986.
- Arbi Sanit, *Perwakilan Politik Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1885.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial; Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, Airlangga, University Press, Surabaya, 2001.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
- David Osborne-Ted Goebler, *Reiventing Government*, A. Plume Book, New York, 1993.
- Esmi Warassih., *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, 2005.
- Fathurrahman Djamil, dkk, *Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN): Dalam Perspektif Hukum dan Moral Islam: dalam Menyingkap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*, Aditya Media, Yogyakarta, 1999.
- H. Hadari Nawawi, *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta, Erlangga, 1994.
- H. Siswanto Sunarso, *Hubungan Kemitraan Badan Legislatif & Eksekutif Di Daerah*, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007.
- _____, *Teori Hukum Murni*, Nusamedia & Nuansa, Bandung, 2007.

- Irawan Soejito, *Hubungan pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Joeniarto, *Perkembangan Pemerintahan Lokal*, Jakarta, Bina Aksara, 1992.
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.
- Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Alumni, Bandung, 2004.
- M. Ryaas Rasyid, *Panduan Parlemen Daerah: Kebijakan Otonomi Daerah dan Peran DPRD*, Yayasan API, Jakarta, 2001.
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan*, ANDI, Yogyakarta, 2002.
- Mariaman Darto, *Otonomi Daerah, Civil Society dan Kemandirian Daerah*, Equilibrium, 2005.
- Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Emperis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Organisasi*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1996.
- Paimin Napitupulu, *Menuju Pemerintahan Perwakilan*, Alumni, Bandung, 2007.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Jakarta, 2005.
- Robert Kligoard, *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintah Daerah*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005.
- Rondineli dan Nellis, *Assessing Decentralization Policies in Developing Countries: The Case for Cautious Optimism, in Development, Policies Review*, Sage Publication, London, 1986.
- Sadu Wasistono & Ondo Riyani, *Etika Hubungan Legislatif Eksekutif Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Fokusmedia, Bandung, 2003.
- Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik Indonesia*, Pusat Studi Hukum FHUI, Jakarta, 2005, hlm. 97.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1988.

Sri Sumarwani, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UNDIP Press, Semarang, 2012.

Sumartana, *Etika dan Penanggulangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Era Reformasi*, Aditya Media, Yogyakarta, 1999.

Suwoto Mulyosudarmo, *Peralihan Kekuasaan Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaksara*, Gramedia Pustaka Urata, Jakarta, 1997.

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Penerbit Kanisius, Bandung, 1982.

Usaid, *Membina Hubungan dengan Konstituen*, LGSP, Jakarta, 2007.

Widjajakusuma, *Pengantar Manajemen Syariat*, Khairul Bayan, Jakarta, 2003.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi.

Lain-lain

Abdul Gani Abdullah, *Legal Drafting dan Good Governance*, Jurnal Keadilan, Vol. 5, No. 2, Pusat Kajian Hukum dan Keadilan, Jakarta, 2002.

Acry Deodatus, *DPRD dan Demokratisasi Pemerintahan Daerah*, Workshop Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, Semarang, 25 Maret 2002.

Ahmad Elqorni, Fungsi Pengawasan dalam Organisasi, Sumber: <http://said-iqbal.blogspot.com/2012/01/fungsi-pengawasan-dalam-islam.html>.

Aman Sudarto, *Analisis Kinerja*, Diklat Provinsi Dati I Jatim, Surabaya, 1999.

- Asian Development Bank (ADB), *Good Governance and Anticorruption: The Road Forward for Indonesia*”, Makalah Dipresentasikan dalam Pertemuan Puncak CGI ke Delapan, Paris, 27-28 Juni 1999.
- Bambang Widjojanto, *Harmonisasi Peran Penegak Hukum dalam Pemberantasan Korupsi*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 4 No. 1, Ditjen Peraturan Perundang-undangan, Jakarta Selatan, 1 Maret 2007.
- Fadillah Putra, *Perangkap Good Governance dalam Liberalisasi Konstitusi Indonesia*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 4 No. 2, Mahkamah Konstitusi, 2 Juni 2008.
- Laporan Tahunan, *Memupuk Keberlanjutan Tata Pemerintahan yang Baik yang Terdesentralisasi*, Local Governance Support Program, 2006.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat*, Sekretariat Jendral MPR RI, Jakarta, 2006,
- Muhammad Fauzan, dkk, *Implementasi Pemerintah yang Bersih dalam Rangka Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi, (RAD-PK)*, Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jendral Sudirna Purwokerto, Semarang, 2012.
- Munir Amir & Reni Dwi Purnomowati, *Lembaga Perwakilan Rakyat*, Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, Jakarta, 2005, hlm. 13. Lihat pula, A.F Polard, *The Evolution of Parliament, Representation was not the off spring at democratic theory, but an incident at the feudal system.*
- Rochman Achwan, *Good Governance: Manifesto Politik Abad ke-21* dalam Kompas, Rabu, 28 Juni 2000.
- Soeparmo, *Pengawasan Administrasi Dan Pengawasan Pelaksanaan APBD*, Bahan Presentase Pada Kegiatan Pembekalan DPRD Kab. Serdang Bedagai, Dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Medan, Medan, 2006.
- Teten Masduki, *Jurnal Keadilan*, Vol. 5, No. 2 Pusat Kajian Hukum dan Keadilan, Jakarta, 2002.
- tribunnews.com, *Mantan Sekda Bombana Korupsi Rp. 1,2 Miliar Akhirnya Dibui*, di posting Jum’at 8 Agustus 2014, 14:55 WIB,
<http://www.tribunnews.com/regional/2014/08/08/mantan-sekda-bombana-korupsi-rp-12-miliar-akhirnya-dibui>,
di akses jum’at 5 Desember 2014.

Yunelita Kahar, *Fungsi DPRD dalam pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Kota Padang*, Tesis HTN,UNDIP, Semarang, 2005.